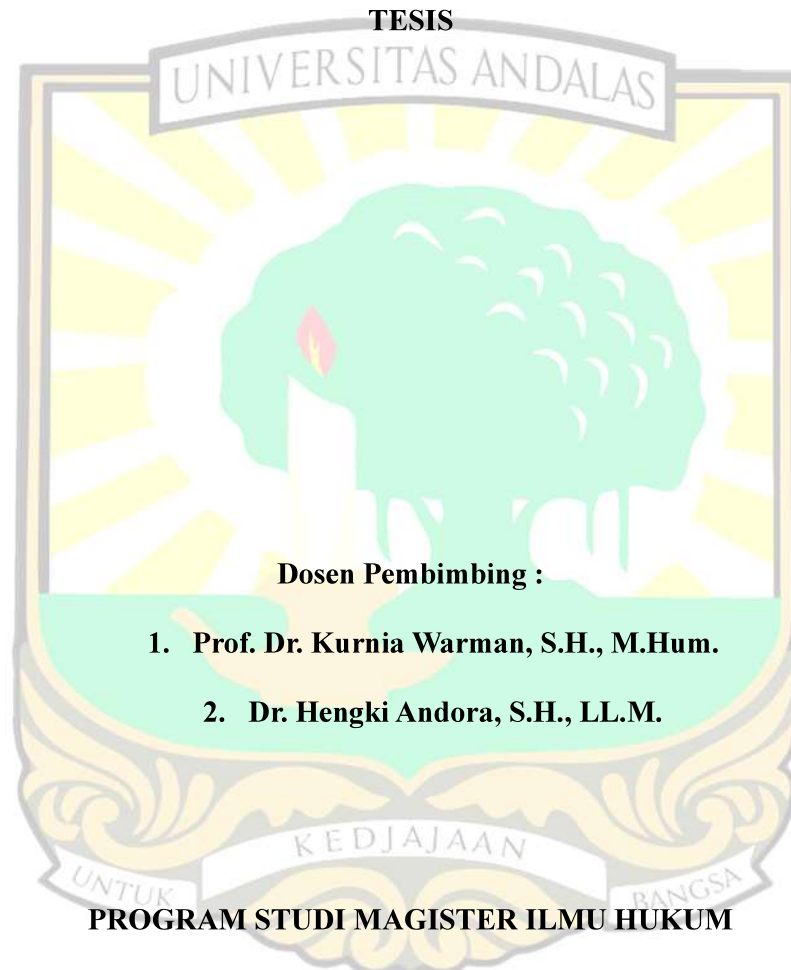


**KEBIJAKAN AFIRMATIF PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
MELALUI PENYEDIA PADA SEKTOR JASA KONSTRUKSI DI
WILAYAH PAPUA**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

TAHUN 2024

**KEBIJAKAN AFIRMATIF PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
MELALUI PENYEDIA PADA SEKTOR JASA KONSTRUKSI DI
WILAYAH PAPUA**

Oleh: Unggul Hangga Yudha, S.H. (2220119010)

ABSTRAK

Kebijakan afirmatif pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia pada sektor jasa konstruksi di wilayah Papua merupakan diskriminasi positif yang dilakukan dengan tujuan untuk memastikan keterlibatan pelaku usaha Papua secara langsung dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Permasalahan muncul khususnya pada sektor jasa konstruksi karena adanya perbedaan pelaksanaan kebijakan afirmatif tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk, penerapan serta sanksi hukum apabila melanggar kebijakan afirmatif pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia pada sektor jasa konstruksi di wilayah Papua. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif-empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang didukung dengan data empirik. Hasil penelitian: Pertama, kebijakan afirmatif pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia pada sektor jasa konstruksi di wilayah Papua memastikan keterlibatan secara langsung pelaku usaha Papua dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di wilayah Papua. Dalam pengaturannya terdapat pertentangan antara Pergub Papua Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Provinsi Papua dengan Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota dimana ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur turut mengatur APBN sedangkan dalam Peraturan Menteri kewenangan pemerintah provinsi terbatas pada APBD. Kedua, belum tercapai kepastian hukum dalam penerapan kebijakan afirmatif ini karena peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan. Ketiga, para pihak yang tidak melaksanakan kebijakan afirmatif pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia pada sektor jasa konstruksi di wilayah Papua maka akan dikenakan sanksi administratif dimana untuk penyedia jasa sanksi hukum berupa: 1) teguran; 2) digugurkan penawarannya; 3) pemutusan kontrak; dan/atau 4) sanksi daftar hitam. Sedangkan untuk pengguna jasa sanksi hukum berupa hukuman disiplin: 1) ringan; 2) sedang; atau 3) berat.

Kata kunci : Kebijakan Afirmatif, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sektor Jasa Konstruksi, Pelaku Usaha Papua

**AFFIRMATIVE POLICY IN THE GOVERNMENT PROCUREMENT
THROUGH CONSTRUCTION SECTOR PROVIDERS IN THE PAPUA
REGION**

Oleh: Unggul Hangga Yudha, S.H. (2220119010)

ABSTRACT

Affirmative policy of government procurement through providers in the construction sector in the Papua region is positive discrimination carried out with the aim of ensuring direct involvement of Papuan economic operator in the government procurement. Problems arise especially in the construction sector due to differences in the implementation of the affirmative policy. This research aims to analyze the form, application and legal sanctions for violating the affirmative policy of government procurement through providers in the construction sector in the Papua region. This research is a type of normative-empirical research that is descriptive in nature using a statutory approach which is supported by empirical data. Research results: First, affirmative policy of government procurement through providers in the construction sector in the Papua region ensures direct involvement of Papuan economic operator in government procurement in the Papua region. In its regulation, there is a conflict between Regulation of the Governor of the Province Of Papua Number 46 of 2021 on Government Procurement in Papua Province and Regulation of the minister of Public Works And Housing Number 1 of 2023 on Guidelines for Supervision of the Implementation of Construction Services Implemented by Provincial, Regency and City Regional Governments, where the scope of the Governor's Regulation is also included. as well as regulating the APBN, whereas in the Ministerial Regulation the provincial government's authority is limited to the APBD. Second, legal certainty has not been achieved in implementing this affirmative policy due to conflicting laws and regulations. Third, parties who do not implement the affirmative policy of government procurement through providers in the construction sector in the Papua region will be subject to administrative sanctions, which legal sanctions for providers in the form of: 1) a warning; 2) the offer is withdrawn; 3) termination of contract; and/or 4) blacklisting sanctions. Meanwhile, legal sanctions for users is disciplinary punishment in the form of: 1) light; 2) moderate; or 3) heavy.

Keywords : Affirmative Policy, Government Procurement, Construction Sector, Papuan Economic Operator